



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP KEBIJAKAN  
ASIMILASI NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIA  
PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA NOMOR 10 TAHUN 2020**

**SKRIPSI**

Dajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh :

**MITRA MAULANA**  
**NIM: 11724102863**

**PROGRAM STRATA SATU (SI)  
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU  
2021 M/1442 H**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul ***“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Asimilasi Narapidana di Lapas Kelas IIA Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020”***, yang ditulis oleh :

NAMA : MITRA MAULANA

NIM : 11724102863

PROGRAM STUDI : HUKUM TATA NEGARA (JS)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Juli 2021

Pembimbing Skripsi,

Hendri Sayuti M.Ag



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP KEBIJAKAN ASIMILASI NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 10 TAHUN 2020 "* yang ditulis oleh :

Nama : **MITRA MAULANA**  
NIM : 11724102863  
Program Studi : Hukum Tata Negara ( Siyasah )

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 06 Agustus 2021  
Waktu : 13.30 WIB  
Tempat : Daring / Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Agustus 2021  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Rahman Alwi, M.Ag**

Sekretaris  
**Basir, SH., MH**

Penguji I  
**Mohammad Abdi Almaktur, MA**

Penguji II  
**Hairul Amri, M.Ag**


Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 197410062005011005



## ABSTRAK

**Mitra Maulana, (2021): Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Kebijakan Asimilasi Narapidana di Lapas Kelas IIA Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020**

Ditetapkannya Covid-19 sebagai bencana non-alam mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menyelamatkan narapidana di dalam Lapas dari penyebaran Covid-19. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui proses asimilasi ini didasarkan oleh Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana prosedur dan ketentuan pelaksanaan asimilasi narapidana di Lapas Kelas IIA Pekanbaru berdasarkan Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan hal apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan asimilasi narapidana serta bagaimana tinjauannya menurut fiqih siyasah?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui survei langsung ke lapangan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 13 yang terdiri dari Kepala Divisi Pemasyarakatan KANWIL Riau, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Kabid Humas Polresta kota Pekanbaru, 10 orang masyarakat kota Pekanbaru. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, Sampel yang dipilih oleh peneliti yaitu sesuai dengan populasi yang telah peneliti sampaikan di atas yaitu Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 1 orang.

Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah *Wawancara*, *Dokumentasi* dan *Pustaka*.

Berdasarkan hasil penelitian melalui *Wawancara*, *Dokumentasi* dan *Pustaka* dapat diketahui bahwa prosedur dan ketentuan pelaksanaan asimilasi narapidana pada masa pandemi Covid-19 dilaksanakan sepenuhnya sesuai ketentuan yang terdapat pada Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020. Tidak ada aturan pelaksanaan khusus yang dibuat oleh Lapas Kelas IIA Pekanbaru dalam pelaksanaan asimilasi narapidana di masa pandemi Covid-19.

**Kata Kunci : Asimilasi, Narapidana, Fiqih Siyasah**



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis diberi kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang disusun sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil dan pemikiran yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Yth:

1. Ayahanda Shulaini dan Ibunda tercinta Nurhidayah yang merupakan orang yang pertama kali penulis kenal dan lihat pada saat penulis dilahirkan kedunia ini. Ayah dan ibu yang telah berperan sangat penting dalam hidup penulis dan selalu memberikan yang terbaik dalam membentuk karakter dan mendidik penulis mulai dari kecil sampai saat ini serta selalu mendoakan Penulis dalam meraih cita-cita. Tiada kata yang terbaik yang mampu menggambarkan pengorbanan ayah dan ibu dalam setiap langkah yang Penulis lewati. Semoga sehat selalu ayah dan ibu, ridha ayah dan ibu selalu penulis harapkan.
2. Rektor UIN Suska Riau Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag. dan seluruh Civitas Akademika UIN SUSKA Riau.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (siyasa) Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag.
- Bapak Haswir, M.Ag. sebagai Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu dan Ilmunya untuk mengajari dan membimbing Penulis selama perkuliahan.
- Bapak Hendri Sayuti, M.Ag. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan Ilmunya saat Proses penyusunan skripsi ini. Penulis selalu diarahkan dan dibimbing pada setiap ada permasalahan yang tidak bisa dipecahkan oleh Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajarkan banyak materi sehingga Penulis banyak memperoleh ilmu selama perkuliahan.
- Pengelola Perpustakaan atas ilmu yang diberikan serta peminjaman buku sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini.
- Lapas Kelas IIA Pekanbaru yang telah mengizinkan melakukan riset dan memberikan data untuk penelitian ini.
- Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara (siyasa) angkatan 2017 khususnya kelas A.
- UMID Family yang saling memberi semangat satu sama lain dari awal pengajuan proposal penelitian hingga saat ini.
- THE M.G.S yang selalu bergadang bersama pada saat rancangan proposal penelitian hingga saat ini.
- Omaknya Cicil selaku teman seperjuangan saat melakukan penelitian dan yang merawat kucing Peneliti saat ditinggal pulang kampung.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Put selaku teman seperjuangan yang meminjamkan Laptop ketika Laptop  
Peneliti mengalami gangguan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari  
kesempurnaan, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis  
harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, *Aamiin ya  
Robb'all'amin.*

Pekanbaru, 20 Maret 2021  
Penulis

**MITRA MAULANA**  
**NIM.11724102863**

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU</b> .....	14
A. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020.....	14
B. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Dan Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru .....	29
C. Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru .....	31
D. Prinsip-prinsip Pokok Pemasyarakatan .....	33
E. Tahap-tahap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan .....	35
F. Program Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru .....	37
G. Keadaan Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru .....	43
H. Sarana Dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru .....	44
I. Struktur Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru .....	46

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

    a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

    b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB III</b>	<b>LANDASAN TEORI ASIMILASI</b>	
	A. Perihal Asimilasi .....	48
	B. Kebijakan Pemerintah di Indonesia .....	52
	C. Kebijakan Pemerintah Dalam Fiqih Siyasah .....	62
	D. Prinsip-Prinsip Pemerintahan Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah .....	69
<b>BAB VI</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	73
	A. Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lapas Kelas IIA Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 .....	75
	B. Faktor yang mempengaruhi Asimilasi Narapidana .....	83
	C. Tinjauan Fiqih Siyasah (Dusturiyah) Tentang Penerapan Asimilasi Narapidana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 .....	84
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	91
	A. Kesimpulan .....	91
	B. Saran .....	92
	<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	
	<b>LAMPIRAN</b>	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini membahas tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Dalam hukum pidana islam/fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum dari Al-Qur'an dan Hadis.<sup>1</sup> Tujuan dari terbentuknya lembaga pemasyarakatan di Indonesia adalah membentuk warga tahanan (narapidana) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Oleh karena itu istilah pemasyarakatan dalam hukum Islam sama dengan Ta'zir, yang dimana dalam hukum pidana Islam Ta'zir memiliki berbagai arti. Yaitu:

*Mana'a waradda* yang artinya mencegah dan menolak.

*Addaba* yang artinya mendidik.

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo,., *Hukum Pidana* (Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2020) h. 12.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

*'Adzdzoma wawaqqara* yang artinya mengagungkan dan menghormati.

*A'aana waqawwa wanashara* yang artinya membantunya, menguatkan, dan menolong.

Dari keempat pengertian tersebut, Pengertian ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Abdul Qodir Audah<sup>2</sup> dan Wahbah Zuhaili.<sup>3</sup> Ta'zir diartikan mencegah dan menolak (*Mana'a waradda*) karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Ta'zir diartikan mendidik karena takzir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahanya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.<sup>4</sup> Menurut istilah, ta'zir didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut:

*"Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'".*

Wahbah Zuhaili memberikan definisi ta'zir yang mirip dengan definisi

Al-Mawardi:

*Ta'zir menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat".*

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا

فِيهَا مَنْ يَفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ أَعْلَمُائِي مَا لَا تَعْلَمُونَ

أَنجَعُ

Artinya: *"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan*

<sup>2</sup> Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy*, Jus 1, Jus 1, Dar Al-Kitab Al-A'rabi, Beirut, tanpa tahun, h. 81.

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jus VI, Dar al-Fikr, Damaskus, 1989, h. 196.

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muclich. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. 2013. h. 248-249



*menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut data yang Penulis dapatkan dari Kepala Lapas Kelas IIA kota Pekanbaru, Maizar, bahwa Lapas kelas IIA Pekanbaru membebaskan 115 orang warga binaan, ini merupakan total keseluruhan yang mendapatkan Asimilasi. Ini dilakukan untuk pencegahan Covid-19 dan sesuai dengan aturan dalam rangka Asimilasi dan Integrasi Kementrian Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020.

Terkait aturan itu, tidak semua kasus tindak pidana yang mendapatkan hak Asimilasi. Seperti halnya tindak pidana Korupsi, Narkotika dan Pidana Khusus lainnya tidak mendapatkan bebas asimilasi dan integrasi. Hal ini dikarenakan Korupsi masuk dalam PP 99, jadi tidak ada yang mendapatkan hak Asimilasi. Hak Asimilasi di Lapas Kelas IIA Pekanbaru hanya berlaku untuk kasus Pidana Umum saja.

Terkait kebijakan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang asimilasi narapidana, masyarakat berpandangan bahwa kebijakan itu merupakan sebuah kekeliruan karena di dalam lapas/rutan para narapidana seolah sedang dikarantina dan mendukung program pemerintah untuk berdiam diri di rumah.

Angka residivisme di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Dari total 38.882 narapidana yang mendapatkan asimilasi saat pandemi Covid-19, hanya 0,12 persen narapidana yang kembali berulah. Banyak kekhawatiran yang muncul bagaimana narapidana yang dibebaskan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari penjara kembali berulah, residivisme Indonesia cenderung lebih rendah dibandingkan residivisme negara-negara lain, dari total 38.882 narapidana yang menerima asimilasi per 20 April 2020, narapidana yang mengulangi kejahatannya sebanyak 0.12 persen. Jumlah ini jauh lebih kecil dibanding angka residivisme Indonesia dengan angka residivisme dunia.

Terkait banyaknya keluhan dari publik soal warga binaan yang kembali berulah usai dibebaskan, Kementerian Hukum dan HAM terus melakukan evaluasi terkait program asimilasi kepada warga binaannya itu. Kementerian Hukum dan HAM akan bekerja sama dengan Polri dan Pemda setempat untuk mengawasi keseharian warga binaan dilingkungan masyarakat.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM akan mencabut hak asimilasi dan integrasi ribuan narapidana dan anak jika mereka kembali berulah. Selain itu, para narapidana dan anak yang kembali melakukan tindak pidana, akan dimasukkan sel pengasingan. Mereka juga tak mendapat hak remisi sampai waktu tertentu.

Terkait keluhan dan tuduhan masyarakat bahwa setelah pembebasan narapidana tersebut, mereka merasakan bahwa tindak kriminal disekitar mereka makin marak terjadi seperti halnya kasus pencurian. Terkait permasalahan tersebut penulis memperoleh data dari Kabid Humas Polda Riau yaitu Kombes Pol Sunarto. Kepolisian Daerah (Polda) Riau dan jajaran kembali menangkap 22 orang narapidana asimilasi yang dibebaskan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam masa pandemi Covid-19. Mereka ketahuan kembali melakukan tindak kejahatan. "Ada 22 orang Narapidana asimilasi kembali ditangkap karena melakukan tindak pidana. Mereka terlibat

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai tindak kejahatan, seperti pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, penggelapan dan pencurian kendaraan bermotor dan kejahatan lain. Sunarto merincikan, sebanyak 3 orang Napi melakukan pencurian dengan kekerasan (Curas), 11 orang melakukan pencurian dengan pemberatan (Curat) dan 1 orang melakukan penggelapan. Selain itu ada 5 orang Napi ditangkap karena melakukan pencurian kendaraan bermotor. "1 orang napi ditangkap karena melawan pejabat yang berwenang. Dan 1 napi menyimpan senjata api tanpa izin."<sup>5</sup>

Sebelumnya, selama pandemi Covid-19, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau sudah membebaskan sekitar 2.000 orang Napi dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) yang ada di Provinsi Riau. Pembebasan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Bukannya berkelakuan baik, sejumlah napi justru kembali melakukan tindak pidana dan kejahatan. Tindakan mereka tentu sangat meresahkan masyarakat ditambahkan lagi masa sulit akibat Covid-19.

Berdasarkan catatan dari Mabes Polri sejak program pembebasan warga binaan berjalan. Provinsi Riau menduduki peringkat 5 besar yang jumlah napi asimilasinya kembali ditangkap, yaitu sebanyak 125 orang narapidana asimilasi yang ditangkap kala itu.

Terkait permasalahan tersebut, Penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul penelitian **"TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP**

<sup>5</sup> Humas Polda Riau





**KEBIJAKAN ASIMILASI NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 10 TAHUN 2020**” karena Penulis merupakan mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) fakultas Syariah dan Hukum.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini, maka perlu adanya batasan masalah. Adapun masalah yang akan diteliti adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dalam perspektif Siyasah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

### C. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimana Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lapas Kelas IIA Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020?
- Apa faktor yang mempengaruhi Asimilasi Narapidana?
- Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah (Dusturiyah) tentang penerapan Asimilasi Narapidana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020?



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan asimilasi narapidana di Lapas Kelas IIA Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Asimilasi Narapidana di Lapas Kelas IIA Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fikih Siyasah tentang penerapan asimilasi narapidana dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Dari aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kajian tentang salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang hukum dan hak asasi manusia dan studi ilmu politik khususnya *fiqih siyasah*.
- b. Dari aspek praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi kepada Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Riau terkhusus kepada Lapas Kelas IIA Pekanbaru sebagai UPT dalam mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat khususnya kota Pekanbaru.

### E. Metode Penelitian

Agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka peneliti memerlukan metode tertentu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memperoleh hasil penelitian yang memuaskan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:

#### Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau perundang-undangan. Sedangkan Empiris yaitu mengkaji pada kenyataan yang ada dalam sistem pemberian asimilasi kepada narapidana.

#### Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*). *Field study/Field research* bertujuan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa memahami secara konkrit semua masalah sosial yang berlangsung ditengah masyarakat.<sup>6</sup> Objek penelitiannya adalah berupa lapangan yang mampu memberikan informasi tentang kajian penelitian.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*).<sup>7</sup> Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis ingin memberi gambaran selengkap-lengkapny mengenai pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020.

#### Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* dimana data yang di peroleh dari lapangan disimpulkan lalu dianalisis. *Deskriptif* yaitu suatu metode dalam

<sup>6</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung, 2017, h. 35

<sup>7</sup> Hadari Nawawi dan Nini Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta. 1996, h. 174



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meneliti status sekelompok manusia suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat *deskriptif eksploratif* riset yang menghasilkan data yang bersifat kualitatif.

#### Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tertentu diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan yang baik berupa fakta yang diambil dari hasil wawancara yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

Data pada penelitian ini Penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder.

- a. Data primer, yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dikumpulkan dari lapangan. Data ini umumnya diperoleh dari hasil wawancara kepada Kepala Lapas dan Petugas di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur dan tulisan yang berkenaan dengan tema penelitian serta data yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru.

#### Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, merupakan cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pihak yang terkait dilaksanakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.<sup>8</sup> Yang diterapkan dalam proses wawancara penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu

<sup>8</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*. Yogyakarta; BPFE, 2006, h. 62

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Divisi Pemasyarakatan KANWIL Riau, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Kabid Humas Polresta kota Pekanbaru, 10 orang masyarakat kota Pekanbaru

- b. Dokumentasi, merupakan cara memperoleh informasi lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.
- c. Diskusi terfokus/*Focus Group Discussion*

Metode terakhir untuk mengumpulkan data ialah lewat diskusi terfokus, yaitu upaya menemukan makna sebuah isu oleh sekelompok orang lewat diskusi untuk menghindari dari pemaknaan yang salah oleh seorang peneliti. Untuk menghindari pemaknaan secara subjektif oleh seorang peneliti, maka dibentuk kelompok diskusi yang terdiri atas beberapa orang peneliti. Dengan beberapa orang mengkaji sebuah isu diharapkan akan memperoleh hasil pemaknaan yang lebih objektif.

**Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek subjek yang mempunyai kualitas dari karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>9</sup> Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh

<sup>9</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta PT Rajawali Persada 2003)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah yang menjadi sasaran penelitian.<sup>10</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah orang yang terlibat dan terdampak dalam Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020, meliputi : Kepala Divisi Pemasyarakatan KANWIL Riau, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Kabid Humas Polresta kota Pekanbaru, 10 orang masyarakat kota Pekanbaru. Secara keseluruhan populasi berjumlah 13 orang.

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. *Purposive sampling* yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal, sehingga peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti.

Sampel yang dipilih oleh peneliti yaitu sesuai dengan populasi yang telah peneliti sampaikan di atas yaitu Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 1 orang.

**Analisis Data**

Teknik analisis data yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian

<sup>10</sup> Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 147



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.<sup>11</sup>

Metode analisis data dalam penelitian ini, penyusun mengolah data dengan menggunakan metode *deskriptif*, metode ini dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menggambarkan keadaan yang terjadi khususnya pada pelaksanaan asimilasi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab dan tiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 10 TAHUN 2020 DAN GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Peraturan Menteri hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan gambaran umum lokasi penelitian terdiri dari gambaran umum, tempat lokasi penelitian di LAPAS Kelas IIA Pekanbaru.

<sup>11</sup> Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung; Remaja Rosda Karya. 2010, hal 128-179.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **BAB III : TEORI ASIMILASI**

Berisi tinjauan umum yakni pengertian asimilasi terhadap narapidana, tinjauan fiqh siyasah terhadap asimilasi narapidana, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lapas Kelas IIA Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020.
- B. Faktor yang mempengaruhi Asimilasi Narapidana.
- C. Tinjauan Fiqih Siyasah (Dusturiyah) tentang penerapan asimilasi narapidana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari uraian pada bab sebelumnya, diperoleh berdasarkan penelitian yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan. Selanjutnya diikuti daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini dan juga beberapa lampiran.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II**

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
DAN  
GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS IIA PEKANBARU**

**A. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020**

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2020  
TENTANG  
SYARAT PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI  
NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK  
INDONESIA, Menimbang:

1. bahwa Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19;  
bahwa Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam, perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara;  
bahwa untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19;

Mengingat:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasysarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282) sebagaimana telah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 893).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SYARAT PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.

Anak Yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cuti Mengunjungi Keluarga adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana dan Anak untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat.

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.

7. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana.
8. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
11. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II**

### **PEMBERIAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SELAIN TINDAK PIDANA TERORISME, NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, KORUPSI, KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA DAN KEJAHATAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT, SERTA KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISASI, WARGA NEGARA ASING**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 2**

1. Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas.
2. Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
  - b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
  - c. telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana.

#### **Pasal 3**

1. Asimilasi Anak dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas.
2. Anak yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
5. telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

### Bagian Kedua

### Syarat Pemberian Asimilasi

#### Pasal 4

Syarat pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

1. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2. bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsidaer pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan;
3. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
4. salinan register F dari Kepala Lapas;
5. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
6. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.



### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pemberian Asimilasi

##### Pasal 5

Pemberian Asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi pemsyarakatan.

Sistem informasi pemsyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan system informasi pemsyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemsyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.

3. Dalam hal pemberian Asimilasi melalui Sistem Informasi Pemsyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, Kepala lapas/LPKA dapat memberikan Asimilasi secara manual.

##### Pasal 6

1. Petugas pemsyarakatan mendata Narapidana dan Anak yang akan diusulkan mendapatkan Asimilasi.

Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap syarat pemberian Asimilasi dan kelengkapan dokumen.

Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana dan Anak berada di Lapas/LPKA.

Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi paling lama:

- a. 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas; dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. 3 (tiga) bulan sejak Anak berada di LPKA.

**Pasal 7**

Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasikan usulan pemberian Asimilasi bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi syarat.

Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lapas/LPKA menetapkan pemberian Asimilasi.

3. Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menerbitkan surat keputusan secara manual, maka Kepala Lapas/LPKA mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi kepada kantor wilayah.
4. Kantor wilayah mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi Lapas/LPKA kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

**Pasal 8**

Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika hanya berlaku pada narapidana yang dipidana dengan pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun.

UIN SUSKA RIAU

### BAB III

## **PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SELAIN TINDAK PIDANA TERORISME, NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, KORUPSI, KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA DAN KEJAHATAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT, SERTA KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISASI, WARGA NEGARA ASING**

### **Bagian Kesatu**

### **Umum**

### **Pasal 9**

Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

1. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;  
berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;  
telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat;  
dan  
masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Pasal 10

Pemberian Cuti Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga), dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 6 (enam) bulan;
- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana;
- c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat;
- d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

### Pasal 11

Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Anak yang sedang menjalani pidana penjara di LPKA yang telah memenuhi syarat:

- a. telah menjalani masa pidana paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana;
- b. dan
- c. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Bagian Kedua**

**Syarat Pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat**

**Pasal 12**

Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:

1. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA;
3. salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;
4. salinan daftar perubahan dari Lapas/LPKA; dan
5. surat pernyataan dari Narapidana/Anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum.

**Bagian Ketiga**

**Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat**

**Pasal 13**

Pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi pemsyarakatan.

Sistem informasi pemsyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi pemsyarakatan yang terintegrasi antara Unit

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.

**Pasal 14**

Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana dan Anak yang akan diusulkan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap syarat pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dan kelengkapan dokumen.

**Pasal 15**

1. Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi persyaratan. Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN: Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Pasal 16

Direktur Jenderal melakukan verifikasi usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

### Pasal 17

Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

2. Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.

### Pasal 18

Kepala Lapas/LPKA bertanggung jawab terhadap kebenaran, keabsahan dan kelengkapan dokumen usulan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat yang dibuktikan dengan surat pertanggungjawaban keabsahan dokumen.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Pasal 19**

Kepala Bapas bertanggung jawab terhadap pembimbingan dan pengawasan terhadap Narapidana dan Anak yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

**Pasal 20**

Dalam hal Kepala Lapas/LPKA dan Kepala Bapas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Menteri dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 21**

Ketentuan mengenai pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat berlaku secara mutatis mutandis terhadap Narapidana yang berada pada rumah tahanan negara.

**Pasal 22**

Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika hanya berlaku pada Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun.

**Pasal 23**

Peraturan Menteri ini berlaku bagi narapidana yang tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dan anak yang tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berakhir sampai dengan masa kedaruratan terhadap penanggulangan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Dan Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

### 1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Secara formal sistem pemasyarakatan dicetuskan pada tanggal 05 Juli 1953 oleh Dr. Suharjo, S.H yaitu Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada peresmian gelar Doctor Causa di Istana Negara. Adapun isi pidatonya antara lain bahwa pohon beringin pengayoman ditetapkan menjadi sumber hukum dan lambang Departemen Kehakiman agar menjadi penyuluh bagi para petugasnya dalam membina hukum menjalankan peradilan guna memberi keadilan, dalam meperlakukan narapidana. Dibawah pohon beringin pengayoman tujuan hukum pidana adalah mengayomi masyarakat terhadap perbuatan yang mengganggu tertib masyarakat dengan mengancam tindakan-tindakan terhadap si pengganggu dengan maksud untuk mencegah pengganggu tertib masyarakat.

Dibawah pohon beringin pengayoman telah ditetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana maka tujuan pidana penjara dirumuskan, disamping menimbulkan rasa derita bagi para terpidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertaubat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 10 Tahun 2020



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat Indonesia yang berguna, dengan singkat menjadi tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Pada tanggal 27 April 1964 diselenggarakan tentang dasar, tujuan dan kedudukan pemasyarakatan yang bertitik tolak pada perlakuan narapidana dengan dasar kegotongroyongan.

Kegotongroyongan yang dinamis antara narapidana yang bersangkutan dan masyarakat luar merupakan tujuan tunggal kemasyarakatan, dan pelaksanaannya pemasyarakatan masih mengacu kepada *Gectichen Reglement* (peraturan penjara). Pada Konferensi Nasional Kopenjaraan di Green Hotel Lembang di Kota Bandung, didahului oleh amanat Presiden Republik Indonesia yang dibacakan oleh Astra Winata, SH yang menggantikan kedudukan almarhum Dr. Suharjo, SH sebagai Menteri Kehakiman, istilah kopenjaraan diganti dengan pemasyarakatan, pada saat bersejarah akhirnya ditetapkan sebagai hari pemasyarakatan. Dalam konferensi lembaga dirumuskan prinsip-prinsip pokok yang menyangkut perlakuan terhadap narapidana.

#### Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru terletak di Ibukota Provinsi Riau yakni Pekanbaru Kota Bertuah (Bersih, Tertib, Usaha Bersama dan Harmonis), yang merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat kebudayaan dan pendidikan, disamping pusat hunian penduduk yang jumlahnya lebih kurang 799.213 jiwa. Dengan luas wilayah 632,23 km<sup>2</sup>, kota Pekanbaru menjadi salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi Sumatera yang terus berkembang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru didirikan pada tahun 1964 dengan status “*Penjara*”, terletak di Jalan Samratulangi Pekanbaru, yang dekat dengan pusat perkantoran perdagangan (Jalan Achmad Yani dan Jalan Juanda), dan perumahan penduduk.

Seiring dengan perkembangan kota Pekanbaru yang cepat berkembang, dan pertimbangan lahan penjara yang sempit dan di kelas jalan “Kelas IV” yang kurang strategis, maka pada tahun 1976 dipindahkan kelurahan yang cukup luas dan strategis yakni di jalan Pemasyarakatan nomor 19 kecamatan Tangkerang Utara (sekarang kecamatan Bukit Raya) kota Pekanbaru.

Tahun 1977 mulai dibangun dengan luas bangunan 2.938 m<sup>2</sup> diatas lahan seluas 33.000 m<sup>2</sup>, dan barulah pada tahun 1978 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mulai difungsikan pemakaiannya, dan sampai dengan tahun 2020 ini telah banyak penambahan dan rehabilitasi bangunan, baik dari dana APBD Provinsi Riau.

Tahun 2013 telah dibangun Blok Hunian 2 tingkat seluas 715 m<sup>2</sup>, berasal dari bantuan APBD Provinsi Riau sebesar Rp 6 Milyar dalam bentuk hibah.

**C. Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru**

Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, tentunya mengacu pada Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa, membangun manusia mandiri.

### Misi Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Pekanbaru

Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta pengelolaan benda-benda sitaan Negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta peajuan dan perlindungan Hak Azasi Manusia.

### 3. Sasaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

- a. Melakukan pembinaan Narapidana
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
- c. Melakukan bimbingan sosial kerohanian Narapidana
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga
- f. Memantapkan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang kondusif dan aman.

### Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

- a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan masyarakat, dapat aktif dan berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggungjawab.

- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di rumah tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan atau para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk diperlukan barang bukti pada saat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

#### D. Prinsip-prinsip Pokok Pemasyarakatan

Dasar falsafah sistem pemasyarakatan yang berdasarkan kepribadian Indonesia dan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Adapun unsur-unsur yang merupakan prinsip-prinsip pokok dalam Konsepsi Pemasyarakatan (1964) yang pertama di Lembang Bandung 27 April 1974.

Adapun prinsip-prinsip pokok tersebut ialah sebagai berikut :

Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.

Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam Negara.

Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat.

Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi hukuman pidana.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana harus dikenalkan dan tidak boleh disingkirkan dari masyarakat.

Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan Negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan untuk menunjang usaha peningkatan produksi.

Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana harus berdasarkan pancasila.

Narapidana sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan harus diperlakukan sebagai manusia.

9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
10. Disediakan sarana-sarana yang mendukung fungsi rehabilitative, korektif, dan edukatif dalam sistem kemasyarakatan.

Dari kesepuluh prinsip-prinsip pokok Pemasyarakatan tersebut terlihat bahwa didalam pembinaannya narapidana bukan lagi penjahat yang harus selalu mendekam dan terkurung dalam penjara atau sel, tetapi mereka dibina dan dididikbaik jasmani maupun rohani, dan juga diberikan keterampilan. Untuk mewujudkan hal tersebut pembinaannya bukan hanya tergantung pada petugas-petugas Lembaga Pemasyarakatan saja. Tetapi juga turut berperan aktif apalagi para pembimbing dan penceramah yang berkewajiban untuk memberikan bimbingan rohani khususnya dibidang akhlak merupakan salah

Salah satu tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan disamping tugas-tugas melaksanakan bimbingan keterampilan.

### E. Tahap-tahap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan

Berikut ini adalah tahap-tahap pembinaan berdasarkan pasal-pasal pada PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

#### Pembinaan Tahap Awal

Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai 1/3 (satu pertiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap awal ini meliputi :

- Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
- Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

Tahap ini diawali dengan tahap admisi dan orientasi, yaitu sejak masuk di daftar, diteliti surat-surat vonisnya, lama pidananya, diperhitungkan kapan bebasnya, hasil penelitian tersebut penting untuk penyusunan program pembinaan selanjutnya.

#### Pembinaan Tahap Lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan dibagi dalam 2 (dua) periode :

- Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu perdua) dari masa pidana;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana.

Pembinaan tahap lanjutan meliputi :

- 1) Perencanaan program pembinaan lanjutan;
- 2) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- 3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

#### Pembinaan Tahap Akhir

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

Pembinaan tahap akhir meliputi :

- a. Perencanaan program integrasi
- b. Pelaksanaan program integrasi
- c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir

Tahap integrasi atau non institusional, tahap ini apabila narapidana sudah menjalani 2/3 masa pidananya dan paling sedikit 9 bulan, narapidana sudah dapat diusulkan diberikan pembebasan bersyarat. Disini narapidana sudah sepenuhnya berada ditengah-tengah masyarakat dan keluarga. Setelah pembebasan bersyarat habis, kembali ke lembaga pemasyarakatan untuk mengurus atau menyelesaikan surat bebas atau surat lepasnya.

Apabila dalam tahap ini mendapatkan kesulitan atau hal-hal yang memungkinkan tidak mendapatkan persyaratan pembebasan bersyarat,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka narapidana diberikan cuti panjang lepas yang lama sama dengan banyaknya remisi berakhir, tapi tidak boleh lebih dari 6 bulan. Berdasarkan uraian diatas, tampak jelas bahwa proses pemasyarakatan berjalan tahap demi tahap dan masing-masing tahap ada gerak kearah menuju kematangan.

Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan untuk pembinaan tahap akhir dilaksanakan diluar Lembaga Pemasyarakatan oleh Bapas. Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan.

#### F. Program Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Program kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru ini disusun merupakan serangkaian kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru yang secara operasional dapat dilaksanakan dalam waktu yang pendek maupun jangka waktu yang panjang. Disamping itu program kerja ini dimaksudkan untuk menetapkan dengan jelas sasaran langkah-langkah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mendatang sebagai wujud nyata keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dalam membangun manusia Islami khususnya dan para narapidana umumnya yang sarat dengan iman, ilmu dan amal sholeh. Program Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dibagi dalam :

### Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mengkoordinasikan program pembinaan kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan ketatausahaan meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga, sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan pemasyarakatan Narapidana, dan menyelenggarakan program :

- a. Menetapkan rencana kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru,
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan kerja dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait,
- c. Mengkoordinasikan tindak lanjut petunjuk yang tertuang LHP,
- d. Melakukan pengawasan melekat di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru
- e. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran rutin pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru
- f. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru
- g. Mengkoordinasikan pengelolaan perlengkapan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru
- h. Mengkoordinasikan kebutuhan formasi pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru
- i. Mengkoordinasikan program kerja yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Bidang Tata Usaha

Mempunyai program mengkoordinasi dibidang ketata usahaan seperti kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumah tanggaan, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan administrasi dan fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, dengan program:

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha
- b. Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk dengan sistem kartu kendali untuk memperlancar penerimaan informasi
- c. Menyelenggarakan urusan kearsipan dan dokumentasi dengan mengatur kegiatan penyediaan, pelayanan pinjaman, penyimpanan dan pemeliharaan arsip dan dokumen kantor
- d. Menyelenggarakan dan mengatur penggunaan, pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap saat ingin digunakan
- e. Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disiapkan
- f. Menyelesaikan pelaksanaan penghapusan atau penjualan alat perlengkapan kantor dan kendaraan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku
- g. Mengkoordinasikan penyusunan Daftar Usulan Kegiatan dan Daftar Usulan Proyek sebagai bahan penyediaan dana kegiatan dan pembangunan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Bidang Pembinaan Narapidana

Mempunyai program memberikan pembinaan Narapidana berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku, dalam rangka persiapan Narapidana kembali ke masyarakat tidak melanggar hukum lagi, dengan program:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan
- b. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahan
- c. Melakukan pembinaan pegawai bawahan
- d. Melaksanakan ketatausahaan dalam bidang pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan
- e. Melakukan pengawasan melekat (Waskat)
- f. Menentukan program pembinaan, melalui siding TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) dan memimpin jalannya siding
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dengan instansi terkait
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Lapas

### Bidang Kegiatan Kerja

Mengkoordinasikan, menyiapkan pelaksanaan bimbingan latihan kerja, serta mengelola hasil kerja sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pembinaan keterampilan Narapidana sebagai bekal apabila kembali ke masyarakat, dengan program :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Kegiatan Kerja
- b. Mengkoordinasikan pemberian bimbingan kerja Narapidana

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memilih dan memanfaatkan keterampilan Narapidana yang menonjol sebagai tutor dalam pembuatan barang produksi
- d. Mempersiapkan fasilitas sarana kerja Narapidana
- e. Mengelola hasil kerja untuk menunjang kegairahan kerja Narapidana
- f. Melakukan pembinaan pegawai di lingkungan Seksi Kegiatan Kerja guna sebagai dasar penetapan penilaian pelaksanaan pekerjaan
- g. Mengkoordinasikan ketata usahaan dalam lingkungan seksi kegiatan kerja serta melakukan pengawasan melekat (Waskat)
- h. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Lapas dalam bidang teknis Pemasyarakatan dan membuat atau menyusun laporan Seksi Kegiatan Kerja.

**5. Bidang Administrasi Keamanan Dan Ketertiban**

Mempunyai program kerja mengkoordinasikan kegiatan administrasi keamanan dan Tata Tertib, mengatur jadwal kerja dan penggunaan perlengkapan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, dalam rangka terciptanya suasana aman tertib dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, dengan program :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban
- b. Melakukan bimbingan pegawai bawahan dan memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahan
- c. Pengawasan melekat (Waskat) dan melaksanakan ketata usahaan dalam lingkup Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mengatur jadwal kerja penggunaan perlengkapan dan pembagian kerja pengamanan
- e. Menerima dan meneliti laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bekerja dan menyusun laporan berkala dari bidang keamanan dan menegakkan tata tertib
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan penggeledahan kamar hunian secara acak dan insidental dengan seksi yang lain
- g. Menyusun laporan berkala seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban

**6. Bidang Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)**

Mempunyai program mengkoordinasikan pelaksanaan kerja penjagaan sesuai jadwal agar tercapai keamanan dan ketertiban dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, dengan program :

- a. Menyusun rencana kerja Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawasan terhadap Narapidana
- c. Mengkoordinasikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan
- d. Mengawasi penerimaan, penempatan dan pengeluaran Narapidana
- e. Melakukan pemeriksaan pelanggaran keamanan dan ketertiban
- f. Menyusun laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan
- g. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap bawahan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Melakukan bimbingan dan pengawasan melekat (Waskat) kepada bawahan
- i. Menyusun laporan berkala Kesatuan Pengamanan Lembaga Masyarakatan

**G. Keadaan Bangunan Lembaga Masyarakatan Kelas IIA Pekanbaru**

Lapas kelas IIA Pekanbaru saat ini memiliki luas bangunan 2.854 m<sup>2</sup>,

atas lahan seluas 33.300 m<sup>2</sup>, terdiri atas :

Bangunan kantor Lapas Kelas IIA Pekanbaru seluas 660 m<sup>2</sup>, yang digunakan untuk kegiatan menunjang kegiatan administrasi, pelayanan umum dan kegiatan lainnya

2. Bangunan ruang hunian blok A seluas 240 m<sup>2</sup>, yang terdiri dari 8 kamar, dengan daya tampung sekitar lebih kurang 115 orang.

3. Bangunan ruang hunian blok B seluas 460 m<sup>2</sup>, terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang dari 225 orang.

Bangunan ruang hunian blok C seluas 300 m<sup>2</sup> yang terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 155 orang.

Bangunan ruang hunian blok D seluas 291 m<sup>2</sup> yang terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 225 orang .

Bangunan ruang hunian blok E seluas 174 m<sup>2</sup> yang terdiri dari 4 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 60 orang

Bangunan ruang hunian blok F seluas 95 m<sup>2</sup> terdiri dari 5 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 70 orang. Bangunan ruang hunian straaf sel seluas 40 m<sup>2</sup> terdiri dari 5 kamar.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bangunan ruang hunian blok G seluas seluas 110 m<sup>2</sup> terdiri dari 9 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 74 orang.

Bangunan ruang hunian Tahanan (Bantuan Pemda Provinsi Riau Tahun 2008) seluas 660 m<sup>2</sup>, terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 350 orang.

10. Bangunan Aula ruang serba guna untuk kegiatan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, dan kegiatan lainnya, seluas 240 m<sup>2</sup>.

11. Bangunan ruang dapur seluas 166 m<sup>2</sup> ditambah gudang beras 21 m<sup>2</sup>.

12. Bangunan ruang Pustaka Lapas Kelas IIA Pekanbaru seluas 45 m<sup>2</sup>.

13. Bangunan Masjid At-taubah seluas 120 m<sup>2</sup>.

14. Bangunan Gereja seluas 240 m<sup>2</sup>.

15. Bangunan Pos atas Jaga sebanyak 5 buah seluas masing-masing 16 m<sup>2</sup>.

16. Bangunan ruang kegiatan kerja WBP seluas 25 m<sup>2</sup>.

17. Pada Tahun 2013 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mendapatkan bantuan Gedung Blok Hunian 2 lantai dari Pemerintah Provinsi Riau.

#### H. Sarana Dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru memiliki sarana prasarana untuk kegiatan Warga Binaan Pemasyarakatan dan pegawai, serta pelayanan umum lainnya, dengan fasilitas :

Memiliki lapangan Tenis (Terbuka), Bulu Tangkis (Tertutup di aula), Pemasyarakatan dapat melakukan gerak jalan santai setiap pagi dan sore hari, serta olahraga Futsal dan Volly Ball di Lapangan tenis.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memiliki satu buah Mesjid At-taubah untuk kegiatan ibadah bagi Warga Binaan dan pegawai yang beragama Islam, dan satu buah Gereja untuk tempat ibadah bagi Warga Binaan dan pegawai yang beragama Kristiani.

Memiliki ruang fasilitas kesehatan (Klinik) dengan 2 orang dokter umum, 3 orang perawat dan obat-obatan, disamping ada satu ruang inap sementara memakai ruang tahanan untuk narapidana yang sakit berkepanjangan, apabila kondisi darurat diantar dan dirujuk ke Rumah Sakit.

Memiliki dua ruang Kantin untuk memberikan pelayanan umum bagi Warga Binaan Pemasarakatan, pegawai dan tamu yang bezuk.

5. Memiliki dua ruang Tamu yang digunakan Warga Binaan menerima keluarga bezuk, mulai jam 09.00 sampai 12.00 WIB, dan hari minggu libur serta ditiadakan untuk bezuk.

6. Memiliki satu loket pendaftaran tamu bezuk, didukung sistem komputerisasi Rekam Foto Wajah Tamu dan disediakan 25 buah kursi duduk dibawah atap di halaman depan parkir.

Memiliki ruang P2U yang dipantau CCTV dan dimonitor dari ruang Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru setiap hari.

Memiliki fasilitas Keamanan dan Ketertiban serta pengawasan berlapis, mulai ruang P2U pintu pertama masuk Tamu (dilakukan check and recheck, dan tamu pria diberi cap tanda masuk ditangan). Disamping pemeriksaan barang bawaan, berlanjut ke ruang pemeriksaan kedua (didepan ruang Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan) yang bertugas memeriksa ulang barang bawaan yang masuk, sekaligus memanggil narapidana yang ada tamunya yang bezuk melalui pengeras suara.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memiliki satu ruang Konsultasi Hukum, bagi Warga Binaan yang memerlukan konsultasi hukum dengan Pengacara, atau konsultasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan.

10. Memiliki satu bangunan ruang Pustaka dalam rangka meningkatkan minat baca dan pendalaman ilmu pengetahuan Warga Binaan.

11. Memiliki satu ruang Pelatihan Kerja untuk kegiatan yang menambah keterampilan dan keahlian Warga Binaan bila kembali kemasyarakatan nantinya.

12. Memiliki seperangkat alat band, guna mendukung kegiatan kesenian Warga Binaan.

#### I. Struktur Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

- Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru  
: **Maizar, Bc.I.P., S.Sos., M.Si.**
- Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)  
: **Efendi Parlindungan Purba, A.Md.I.P, S.H., M.H.**
- Kepala Urusan Umum  
: **Kokoh Surya, S.E**
- Kepala Urusan Pegawai dan Keuangan  
: **Riki Kartsawati**
- Kepala Seksi Bimbingan Napi dan Anak Didik  
: **Erik Suranta Ginting, A.Md.I.P, S.H.**
- Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: **Nanda Adesaputra, A.Md.P., S.H.**

Kepala Sub Seksi Registrasi

: **Hendra Purnama Cipta, A.Md.P.**

Kepala Seksi Kegiatan Kerja

: **Jefriandy, S.H.**

Kepala Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja

: **Haby Surrahman, S.H., M.H.**

Kepala Sub Seksi Sarana Kerja

: **Kasipon Andriadi, S.H**

- Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

: **Harles Marbun, S.Sos.**

- Kepala Sub Seksi Keamanan

: **Hasyuyun Firnanda, S.Sos.**

- Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

: **Parade Damanik, S.Sos.**<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Lapas Kelas IIA Pekanbaru.2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### LANDASAN TEORI ASIMILASI

#### A. Perihal Asimilasi

##### Pengertian Asimilasi

Asimilasi berasal dari bahasa latin yaitu *assimilare* yang berarti “menjadi sama”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia asimilasi adalah penyesuaian (peleburan) sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar. Asimilasi biasanya ditandai dengan adanya upaya-upaya untuk mengurangi adanya perbedaan-perbedaan yang terdapat diantara perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Bila individu manusia melakukan asimilasi dalam suatu kelompok, berarti individu manusia dan kelompok akan melebur. Dalam proses peleburan ini terjadi pertukaran unsur budaya. Pertukaran terjadi apabila suatu individu atau kelompok menyerap budaya kelompok lainnya. Menurut Soerjono Soekanto, yakni:

“Asimilasi didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama”.

Apabila seseorang melakukan asimilasi kedalam suatu kelompok manusia atau masyarakat, maka dia tidak lagi membedakan dirinya dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok tersebut yang mengakibatkan bahwa dirinya dianggap sebagai orang asing. Dalam asimilasi, mereka mengidentifikasikan dirinya dengan kepentingan-kepentingan serta tujuan-tujuan kelompok. Apabila dua kelompok manusia melakukan asimilasi, batas-batas antara kelompok tadi akan hilang dan keduanya lebur menjadi satu kelompok.

Secara singkat asimilasi ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama, walaupun kadangkala bersifat emosional, dengan tujuan untuk mencapai kesatuan, atau paling sedikit mencapai integrasi dalam organisasi, fikiran dan tindakan.

**2. Bentuk-bentuk Asimilasi**

Pada saat melakukan asimilasi membutuhkan suatu proses, proses ini membutuhkan suatu prasyarat, yaitu bila terjadi saling penyesuaian diri sehingga memungkinkan terjadinya kontak dan komunikasi sebagai landasan untuk dapat berinteraksi dan memahami diantara kedua etnis. Maka akan terbentuk satu kesatuan definisi dalam menafsirkan suatu ungkapan atau symbol-simbol dari lawan bicara.

Terbentuknya satu kesatuan definisi ini akan memudahkan dan memperlancar suatu interaksi disegala bidang kehidupan. Menurut P. Hariyono dengan mengutip pendapat Milton Gordon bahwa asimilasi menyangkut banyak dimensi kehidupan. Dia telah merinci bentuk asimilasi sebagai proses sosial yang menyangkut baik kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas dalam tujuh bentuk asimilasi yang berkaitan satu sama lain, yaitu:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Asimilasi kebudayaan (akulturasi) yang bertalian dengan perubahan dalam pola-pola kebudayaan guna penyesuaian diri dengan kelompok mayoritas.
- b. Asimilasi struktural yang bertalian dengan masuknya golongan-golongan minoritas secara besar-besaran dalam kelompok-kelompok, perkumpulan-perkumpulan dan pranata-pranata pada tingkat kelompok primer dari golongan mayoritas.
- c. Asimilasi perkawinan (amalgamasi) yang bertalian dengan perkawinan antar golongan secara besar-besaran.
- d. Asimilasi identifikasi yang bertalian dengan perkembangan rasa berdasarkan mayoritas.
- e. Asimilasi sikap yang bertalian dengan tak adanya prasangka.
- f. Asimilasi perilaku yang bertalian dengan tak adanya diskriminasi.
- g. Asimilasi “civic” yang berkaitan dengan tak adanya bentrokan mengenai sistem nilai dan pengertian kekuasaan.

Pelaksanaan asimilasi akan berjalan dengan baik dan lancar apabila terbentuk rasa saling menghormati dan menghargai diantara kedua golongan.

**Pelaksanaan Asimilasi**

Proses asimilasi tidak begitu saja terjadi, terdapat persyaratan timbulnya asimilasi yaitu apabila ada:

- a. Kelompok-kelompok manusia yang asal dari lingkungan-lingkungan kebudayaan yang berbeda.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Individu-individu dari kelompok-kelompok tadi saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang cukup lama sehingga,
- c. Kebudayaan-kebudayaan dari kelompok-kelompok tadi masing-masing berubah saling menyesuaikan diri menjadi satu.

Biasanya golongan-golongan yang tersangkut proses asimilasi adalah suatu golongan mayoritas dan golongan minoritas. Dalam hal ini golongan minoritas mengubah sifat khas dari unsur-unsur kebudayaannya dan menyesuaikan dengan kebudayaan dari golongan mayoritas, yang dilakukan secara terus menerus sehingga lambat laun akan kehilangan kepribadian kebudayaannya dan masuk ke dalam kebudayaan mayoritas.

Asimilasi sangat berhubungan dengan pengembangan sikap dan cita-cita yang sama. Di dalam proses tersebut terdapat bentuk interaksi sosial yang memberi arah (kemungkinan-kemungkinan) ke suatu proses asimilasi yaitu:

- a. Interaksi sosial bersifat suatu pendekatan terhadap pihak lain, dimana pihak lain juga berlaku sama.
- Interaksi sosial tersebut tidak mengalami halangan atau pembatasan.
- Interaksi sosial tersebut bersifat langsung dan primer.
- Frekuensi interaksi sosial tinggi dan tetap, serta ada keseimbangan antara pola-pola asimilasi tersebut.

Pada proses asimilasi yang terpenting adalah penggabungan golongan-golongan yang berbeda latar kebudayaannya menjadi satu kebulatan sosiologis dan budaya. Hal itu berarti kebudayaan mana yang akan dibuang dan kebudayaan mana yang akan dipertahankan, sehingga kebudayaan yang diambil dapat terpadu secara harmonis dengan unsur kebudayaan yang lain.

Demikian juga pada golongan minoritas harus bergabung dengan golongan mayoritas, penggabungan golongan ini dapat dikatakan relatif seimbang. Sebab dalam kehidupan sehari-hari suatu kebudayaan tidak dapat lepas sepenuhnya dari pengaruh budaya lain, sekalipun golongan mayoritas tidak dapat lepas dari pengaruh budaya lain. Yang terpenting pengaruh itu tidak merugikan dan merusak kepribadian mayoritas, sebaliknya dapat membentuk kultur yang lebih sesuai di masyarakat.

## B. Kebijakan Pemerintah di Indonesia

### 1. Pengertian Kebijakan Publik

Sebelum dibahas lebih lanjut mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan lainnya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J Frederick sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.<sup>14</sup>

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :<sup>15</sup>

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi

<sup>14</sup> Leo Agustinno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.7.

<sup>15</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 40-50.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Ealau dan Kennetdh Prewitt yang dikutip Charles O. Jones, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik oleh yang membuatnya maupun oleh mereka yang mentaatinya (*a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness om the part of bith those who make it and those who abide it*).<sup>16</sup>

Richard Rose (1969) sebagai seorang pakar ilmu politik menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dimengerti sebagai serangkaian yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan menurutnya dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Terminologi kebijakan adalah bentuk nomina abstrak yang merupakan turunan dari kata bijak dengan mendapat awalan *ke* dan akhiran *an*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bijak berarti selalu menggunakan akal budinya, pandai, mahir dan pandai bercakap-cakap, petah lidah. Adapun kebijakan berarti pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk mencapai sasaran, garis haluan. Dalam bahasa Inggris, kebijakan diartikan sebagai *policy* yang berarti *plan*

<sup>16</sup> Charles O. Jones, *Public Policy*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*of action* (rencana kegiatan) atau *statemen of aims* (pernyataan yang diarahkan).

Anderson yang dikutip oleh Ali Imron mengemukakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah.<sup>17</sup> Budiardjo dalam buku yang sama berpendapat bahwa kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam Kamus Hukum, kebijakan diartikan sebagai rangkai konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya) pernyataan cita-cita, tujuan prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan.

Dari pengertian-pengertian terminologis tersebut, sesungguhnya untuk memberikan pengertian kebijakan dapat digunakan sebagai sudut tinjauan. pengertian itu dapat digunakan, baik dari sudut proses, pelaksanaan, produk maupun dari sudut seni. Yang jelas bahwa pihak-pihak yang membuat kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Kebijakan tersebut merupakan aturan yang semestinya dan harus diikuti tanpa pandang bulu, mengikat siapapun yang dimaksud untuk diikat oleh kebijakan tersebut.

<sup>17</sup> Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depan*. Ed 1, Cet II, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 13.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang didalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternative yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hierarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminology pengertian kebijakan publik itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.<sup>18</sup> Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.<sup>19</sup>

Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.<sup>20</sup>

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Irfan Islamy mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Disamping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), h. 2.

<sup>19</sup> Leo Agustino, *Op.Cit*

<sup>20</sup> Hesel Nogi Tangkilisan, *Implementasi Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Lukman Offset YPAI, 2003), h. 2.

<sup>21</sup> Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 19.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Model dan Mafaat Kebijakan Publik

Model kebijakan adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang dipilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu. Model kebijakan merupakan penyederhanaan sistem masalah dengan membantu mengurai kompleksitas dan menjadikannya dapat dikelola oleh para analisis kebijakan.<sup>22</sup> Model adalah isomorfisme antara dua atau lebih teori empiris, sehingga model seringkali sulit diuji kebenarannya di lapangan. Namun model tetap dapat digunakan sebagai pedoman dalam penelitian, terutama penelitian yang bertujuan untuk mengadakan penggalan atau penemuan baru. Model menjadi pedoman untuk menemukan dan mengusulkan hubungan antara konsep-konsep yang digunakan untuk mengamati gejala sosial.

Kebijakan publik memiliki banyak manfaat, diantaranya dapat membentuk perilaku atau budaya demokrasi, dapat membentuk masyarakat hukum, dan dapat membentuk masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia. Serta mempunyai tujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, melindungi hak masyarakat, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

### Proses Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk

<sup>22</sup> William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), h. 233.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap.

Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

a. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah publik ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

<sup>23</sup> Budi Winarno, *Op.Cit*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternative kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elite jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil, dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan dari para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dilaksanakan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan telah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum. Tahap-tahap kebijakan, penyusunan kebijakan, Adopsi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu dalam pandangan Ripley yang dikutip dalam Subarsono<sup>24</sup>, tahapan kebijakan publik digambarkan sebagai berikut:

#### Tahap Penyusunan Agenda Kebijakan

Dalam tahap ini ada tiga kegiatan yang perlu dilaksanakan:

- a. Membangun persepsi dikalangan *stakeholders* bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai sebuah masalah. Hal ini penting karena bisa jadi suatu gejala yang oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap sebagai masalah, tetapi oleh sekelompok masyarakat yang lainnya atau bahkan oleh para elite politik bukan dianggap sebagai suatu masalah.
- b. Membuat batasan masalah. Tidak semua masalah harus masuk dalam penyusunan agenda kebijakan dan memiliki tingkat urgensi yang tinggi, sehingga perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah-masalah tersebut.
- c. Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisasi kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa dan sebagainya.

#### Tahap Formulasi dan Legitimasi Kebijakan

Pada tahap ini analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang

<sup>24</sup> Subarsono, Ab. 2005. *“Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi”*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 19.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.

#### Tahap Implementasi Kebijakan

Pada tahap ini perlu memperoleh dukungan sumberdaya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme intensif dan sanksi agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik.

#### Tahap Evaluasi terhadap Implementasi, Kinerja dan Dampak Kebijakan

Tindakan (implementasi) kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, yang memerlukan proses berikutnya yakni baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan berhasil.

### C. Kebijakan Pemerintah Dalam Fiqih Siyasah

#### Sejarah Kebijakan Pemerintah Dalam Fiqih Siyasah

Sejarah pemberian pengampunan yang pernah diberikan oleh pemimpin baik itu berupa suatu keputusan ataupun tidak, pemberian pengampunan ataupun tidak, pemberian pengampunan yang dilakukan oleh pemimpin pernah terjadi pada masa pemerintahan Umar dan juga pada masa pemerintahan Utsman.

Pada pemerintahan Utsman pemberian pengampunan juga pernah diberikan oleh Utsman. Bahwa pada masa pemerintahannya Utsman menciptakan kondisi yang aman, tentram, dan juga makmur. Dalam

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

riwayat yang shahih dinyatakan bahwa pada masa pemerintahan Utsman juga tidak ada gangguan keamanan dari pihak musuh, kekayaan melimpah, hubungan antar masyarakat harmonis, mereka diliputi perasaan cinta, persaudaraan, dan persatuan serta tidak ada rasa ketakutan antara seorang mukmin yang lain diberbagai penjuru Negara Islam.<sup>25</sup>

### 2. Teori Syafa'at

Secara harfiah, syafaat berarti pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang mengharapkan pertolongannya; usaha dalam memberikan suatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan suatu mudharat bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An Nisaa ayat 85:

مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾

Artinya: "Barangsiapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) daripadanya. Dan barangsiapa yang memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (QS An Nisaa : 85)

Dalam syari'at Islam terdapat suatu aturan yang cukup penting, berkaitan masalah pengurangan hukuman. Kemudian arti itu berkembang lagi menjadi "Pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang mengharapkan pertolongannya, usaha dalam memberikan suatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan suatu mudarat bagi orang lain."

<sup>25</sup> Desbayy. "Makalah Syariqoh (pencurian)" . <http://desbayy.blogspot.co.id/2015/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html>.



Syafa'at yang sangat tepat diterapkan dalam lapangan kepidanaan Islam, yaitu yang dikemukakan oleh Al-Jurjani dalam kitabnya *Al-Ta'rifat*, yaitu:

“Suatu permintaan dari seorang makhluk yang pernah melakukan suatu kejahatan, supaya dibebaskan dari segala dosa yang pernah dilakukannya”.

Secara terminologi syafa'at adalah meminta bantuan kepada orang lain. Jika apa yang diharapkan seseorang terdapat pada pihak lain yang ditakuti atau disegani, maka ia dapat menuju kepadanya dengan mengedepankan dirinya dengan orang lain menghadap yang dituju itu untuk bersama-sama memohon yang ditakuti dan disegani itu. Orang yang dituju itulah yang mengaju permohonan. Dia menjadi penghubung untuk meraih apa yang diharapkan itu. Syafa'at juga berarti sebagai doa, memohon dihapuskan dosa dan kesalahan seseorang. Syafa'at Nabi pada hakikatnya adalah doa dan munajat beliau pada Allah SWT, karena kedekatan dan kedudukan beliau yang mulia di sisi Allah. Maka Tuhan akan mengabulkan doa tersebut dan meliputi kasih sayang-Nya kepada orang yang telah berbuat dosa, serta mengampuninya. Pada hakikatnya, syafa'at terlahir karena kemuliaan dan kelembutan Allah SWT memberikan izin kepada segenap makhluk yang shaleh, dari malaikat, para rasul, dan orang-orang mukmin, untuk memberi pertolongan pada hari kiamat terhadap orang-orang mukmin yang melakukan maksiat.<sup>75</sup> Bila dikontekskan pada masa sekarang yaitu Asimilasi Narapidana. Salah satu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat Asimilasi Narapidana adalah berkelakuan baik selama menjalani hukuman. Berkelakuan baik itu merupakan interpretasi orang yang bertaubat karena orang yang bertaubat adalah orang yang menyadari bahwa apa yang ia lakukan itu merupakan perbuatan yang salah, sehingga ia bertaubat dan melakukan perbaikan atas perilakunya. Ada tiga macam Syafa'at, yaitu:

Pertama, syafa'at Takwiniyah, berkaitan dengan kesaksian ilmiah filosofis tentang adanya sistem alam semesta yang ditegakkan atas dasar silsilah sebab akibat (Kausalitas), tidak berdiri sendiri pada dzatnya, tidak berdiri sendiri dalam illat (sebab) dan pengaruh yang dimilikinya.

Kedua, syafa'at Qiyadiyyah, (syafa'at berupa bimbingan), syafaat ini berupa kepemimpinan para nabi, para wali, para imam dan kitab suci yang berfungsi sebagai syafa'at untuk mencegah manusia masuk kedalam kemaksiatan dan azabnya.

Ketiga, syafa'at Musthalahah, adalah sampainya rahmat dan magfiroh Allah SWT kepada hamba-hambanya. Magfiroh dan ampunan bisa diperoleh melalui jalan dan sebab-sebab.

**Dasar Hukum**

Adapun dasar hukum tentang adanya konsep al-afwu atau alsyafa'at dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Surat Al-Baqarah (2) ayat 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحَرُّ بِالْحَرِّ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ  
 أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”.<sup>77</sup>

Ayat di atas, menjelaskan bahwa Allah SWT telah memberikan wewenang kepada ahli waris terbunuh, tetapi tidak boleh melampaui batas dalam melaksanakan pembalasan darah tersebut. Yang dimaksud wewenang disini adalah justifikasi sebagai ahli waris korban untuk menuntut qisash atau memberikan pengampunan terhadap pelaku pembunuhan tersebut, dari sini muncullah suatu prinsip hukum Islam bahwa dalam hal pembunuhan dimana pelaku pembalas (penuntut) bukanlah negara melainkan ahli waris dari yang terbunuh. Oleh karena itu, negara sendiri tidak berhak untuk memberikan ampunan.

- b. Surat An-Nisaa” (4) ayat 85

ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تَفْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَتَكْفُرُونَ بَعْضٌ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي  
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ  
 عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾

Artinya: “Barangsiapa yang memberikan syafa’at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya. dan Barangsiapa memberi syafa’at yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Ayat ini mengandung arti bahwa syafa’at ada di dunia dan diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang membutuhkannya sebagaimana kapasitas yang dimiliki oleh seseorang dalam memberikan syafa’at tersebut. Oleh karena itu, secara umum Islam memandang bahwa pada dasarnya memberikan syafa’at berupa bantuan, baik materil maupun moril, atau pertolongan lainnya menurut kebutuhan orang yang meminta syafa’at merupakan tindakan yang terpuji namun bisa juga menjadi suatu tindakan yang tidak terpuji. Dengan kata lain memberikan syafa’at dalam surat An-Nisaa’ ayat 85, bertujuan supaya seseorang ataupun sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana dapat kembali memperoleh hak-haknya sebagai seorang warga negara, karena syafa’at diberikan supaya kembali untuk berbuat kebaikan. Dapatlah dijabarkan makna dari ayat tersebut: barangsiapa yang memberikan dari saat ke saat, untuk siapa dan kapan saja syafa’at yang baik, yakni menjadi perantara sehingga orang lain dapat melaksanakan tuntunan agama, baik dengan mengajak



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun memberikan sesuatu yang memungkinkan orang lain dapat mengerjakan kebajikan, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala darinya yang disebabkan oleh upaya menjadi perantara. Dan barangsiapa yang memberi syafa'at, yakni menjadi perantara untuk terjadinya suatu pekerjaan yang buruk bagi siapa dan kapanpun, niscaya ia akan memikul bagian dosa dari usahanya. Allah SWT. sejak dulu hingga kini dan seterusnya Maha kuasa atas segala sesuatu.

- c. Surat Asy-Syura (42) ayat 40

لَعَلَّآ نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ

Artinya: *“Dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik. Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim”.*

Dalam surat ini menjelaskan tentang seharusnya setiap perbuatan harus ada baalasannya akan tetapi untuk memaafkan dan memberikan kesempatan seseorang untuk merubah dirinya itulah yang lebih baik karena Allah membenci orang-orang yang selalu melakukan kezaliman. Dan seharusnya balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa dengan kejahatan itu. Akan tetapi pemberian remisi yang dikemukakan oleh menteri kahakiman dan menteri hukum sebagai anjuran kepada seseorang yang melakukan kejahatan diberikan kesempatan, melakukan perbuatan yang bisa merubah dirinya sendiri, agar setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat diterima oleh masyarakat. Allah sendiri menerima taubat seseorang yang ingin kembali ke jalan Allah.

#### D. Prinsip-Prinsip Pemerintahan Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah

Masalah pemerintahan dan perpolitikan dalam Islam dikenal dengan "siyasah". Apabila dilihat dari pengertian siyasah sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu al-Qayim dari Ibnu Aqil didefinisikan sebagai langkah perbuatan yang membawa manusia kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan. Kata *siyasah* berasal dari sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.<sup>26</sup>

Islam telah meletakkan seperangkat tata nilai etika yang dapat dijadikan sebagai pedoman dasar bagi pengaturan tingkah laku manusia dalam kehidupan dan pergaulan dengan sesamanya. Prinsip tersebut adalah prinsip tauhid, Sunatullah dan persamaan sesama manusia. Pedoman dasar tersebut menjadi pijakan bagi perumusan prinsip-prinsip Negara Islam dalam melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat, yaitu prinsip keadilan, persamaan dan kebebasan. Ketiga prinsip inilah yang menjadi landasan bagi pengelolaan pemerintahan Islam pada masa-masa awal.

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam suatu pemerintahan dan negara adalah menjaga suatu sistem ketertiban supaya masyarakat dapat menjalankan kehidupan dengan wajar. Pemerintahan pada hakikatnya memiliki amanah untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani

<sup>26</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Persada Media, 2014), h. 3

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam rangka mencapai ketertiban umum. Oleh karena itu, secara umum tugas pokok pemerintah atau penguasa suatu Negara adalah menjamin diterapkannya perlakuan adil kepada setiap warga masyarakat, tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.

Untuk mengemban amanah tersebut maka diperlukan asas-asas penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam menentukan perumusan kebijakan publik pada umumnya serta pengambilan keputusan pada khususnya. Dasar dari al-Qur'an yang dijadikan prinsip-prinsip umum pembuatan dan pelaksanaan kebijakan seorang pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan warga Negara dalam siyasah, diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan pemerintahan. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun Negara Madinah, ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama. Prinsip ini terdapat dalam (QS. An-Nisa' : 58 dan 135):

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”.<sup>27</sup>

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan*”.<sup>28</sup>

Keadilan yang dituntut oleh al-Qur'an beragam maknanya, baik dalam proses penetapan hukum, penegakan sistem kemanusiaan, perjanjian dan sebagainya. Dengan demikian, dalam al-Qur'an dapat ditemukan pembicaraan tentang keadilan dan tauhid sampai keyakinan mengenai hari kebangkitan, dari *nubuwwah* (kenabian) hingga kepemimpinan, dan dari individu hingga masyarakat. Keadilan adalah syarat bagi terciptanya kesempurnaan pribadi, standar kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus jalan terdekat menuju kebahagiaan ukhrawi.

Menurut Murtadha Muthahhari konsep adil dikenal dalam empat hal : pertama, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*,

<sup>28</sup> *Ibid*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang. Kedua, adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apapun. Ketiga, adil adalah memberikan hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Selanjutnya keempat, adil adalah memelihara hak-hak berlanjutnya eksistensi.<sup>29</sup>

*Mufasirin* mengartikan adil dalam al-Qur'an, paling tidak ada empat makna : Pertama, adil dalam arti sama. Kedua, adil dalam arti seimbang. Ketiga, adil dalam arti perhatian pada hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu atau dalam arti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keempat, adil yang dinisbatkan kepada Allah.

Keadilan dalam konteks al-Qur'an, tidak lepas dari moralitas. Realisasi keadilan, pertama-tama berpedoman pada wahyu ilahi. Allah, sebagai yang Maha adil memerintahkan manusia bersikap adil, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Keadilan adalah sendi pergaulan sosial yang paling fundamental. Jika keadilan dilanggar, sendi-sendi masyarakat akan goyah.<sup>30</sup>

### Prinsip Kewajiban Negara dan Rakyat

Semua warga Negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Beberapa hak warga Negara yang perlu dilindungi adalah jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan

<sup>29</sup> Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, (Bandung: Mizan, 2009). H. 53

<sup>30</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqih Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007). h. 188.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi.

Prinsip hak-hak dasar manusia sangat banyak dijumpai dalam al-Qur'an, seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki, hak kebebasan beragama, hak memelihara kehormatan manusia, hak kontrol sosial, hak mendapatkan kehidupan yang layak, dan lain-lain. Diantaranya (QS. Al-Isra : 33):

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu alasan yang benar, dan barangsiapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.

Sementara prinsip kewarganegaraan ditemukan dalam (QS. Al-Anfal : 72) dimana asas dalam Islam dilandasi asas keimanan dan bukan atas dasar yang sempit seperti suku, rasa tau bangsa:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلِيَّتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٦﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung melindungi dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama. Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Ayat-ayat diatas tidak hanya mengandung pesan moral maupun nilai-nilai mulia yang wajib diikuti oleh setiap muslim, akan tetapi juga mengandung tafsir politik yang sangat tinggi dan mendalam menyangkut prinsip dasar konstitusi Negara dalam sistem politik Islam. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya al-Qur'an mengandung nilai-nilai yang bersifat universal dan komperhensif yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi sekaligus berbicara tentang sistem muamalah dengan sesama manusia dalam rangka berkehidupan yang majemuk dalam sebuah institusi Negara. Dimana umat Islam sebagai objek hukum dituntut untuk mengamalkannya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

Demikianlah prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam tata pemerintahan Islam yang saling berkaitan antara satu sama lainnya. Bahwa kekuasaan harus dijaga dengan keadilan, dijalankan atas persamaan, bebas, bermusyawarah, amar ma'ruf nahi munkar, dan kewajiban Negara dan rakyat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan telah diuraikan pada bab sebelumnya diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lapas Kelas IIA Pekanbaru dilaksanakan dengan baik. Pedoman pelaksanaan sepenuhnya atas dasar dan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020. Sebanyak 146 orang Narapidana pada tahun 2020 dan 9 orang Narapidana pada tahun 2021 mendapatkan hak Asimilasi pada masa pandemi Covid-19.
2. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi Asimilasi Narapidana di Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak Lapas, over kapasitas dan penyebaran Covid-19 merupakan faktor yang mempengaruhi Asimilasi Narapidana di Lapas Kelas IIA Pekanbaru.

Berdasarkan tinjauan fiqih siyasah (*Dusturiyah*) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 diartikan sebagai *syafa'at* yang dikembangkan menjadi “Pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang mengharap pertolongannya, usaha dalam memberikan suatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan suatu mudharat bagi orang lain.” dan sebagai bentuk salah satu kewajiban pemerintah untuk memberikan rasa aman. Selain itu pelaksanaan Asimilasi

Narapidana juga berdampak positif bagi kehidupan para Narapidana di Lapas karena Lapas Kelas IIA merupakan salah satu Lapas yang mengalami over kapasitas yang seharusnya hanya berkapasitas 771 orang namun diisi dengan 1.476 orang narapidana. Tentu dalam Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia.

## B. Saran

Saran dari Penulis, dengan adanya kekhawatiran masyarakat tentang penambahan angka kriminalitas ketika Narapidana diberikan Asimilasi dan anggapan masyarakat bahwa Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 ini bukanlah sebuah keputusan yang tepat. Diharapkan kepada petugas yang berwenang dalam hal ini menyampaikan melalui penyuluhan data persentasi total Narapidana yang diberikan Asimilasi dan data Narapidana yang kembali melakukan tindak pidana pra Asimilasi serta hukuman yang harus dijalani oleh narapidana asimilasi apabila kembali melakukan tindak pidana. Selain itu, edukasi secara merata kepada masyarakat tentang landasan, tujuan serta manfaat dari Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kekhawatiran ditengah-tengah masyarakat.

Diharapkan kepada petugas Lapas Kelas IIA Pekanbaru untuk menambah kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada revolusi mental bagi Narapidana agar semakin banyak Narapidana yang sadar dan tidak akan melakukan tindak kejahatan lagi. Selain berguna ketika narapidana kembali di tengah-

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

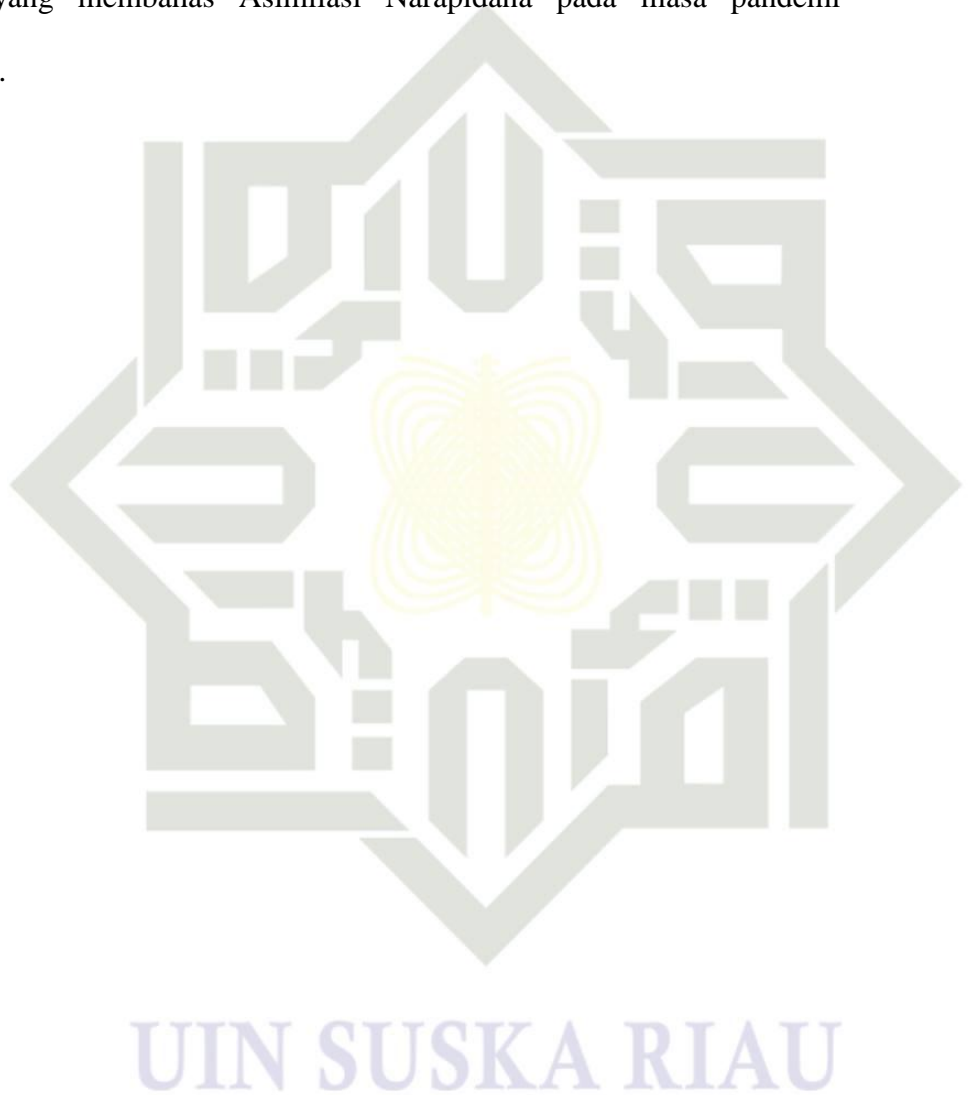
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tengah masyarakat, juga dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi over kapasitas yang terjadi di Lapas Kelas IIA Pekanbaru.

Karena penelitian ini belum tuntas secara sempurna. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya bisa mengangkat masalah tentang Permenkum HAM terbaru yang membahas Asimilasi Narapidana pada masa pandemi Covid-19.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### BUKU

- Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy*, (Jus 1, Jus 1, Dar Al-Kitab Al-A'rabi, Beirut )
- Ahmad Wardi Muclich. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2013)
- Amrullah, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta PT Rajawali Persada 2003)
- Amr Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*.
- Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depan*. Ed 1, Cet II, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002)
- Bisri M. Jaelani, *Ensiklopedia Islam*, (Yogyakarta: Panji Pustaka Yogyakarta, 2007)
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007)
- Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqih Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007)
- Charles O. Jones, *Public Policy*
- Hesel Nogi Tangkilisan, *Implementasi Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI, 2003)
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung. 2017)
- Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)
- Ibn Manzbur, *Lisan Al- 'Arab*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Shadr), 1968.
- Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2010)
- Leo Agustinno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Marzuki, *Metodologi Riset*. (Yogyakarta; BPFE, 2006)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*.
- M.M Azami, *Hadist Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*. (Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 2000)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- M. Sholeh Bajuri, “*Mengupas Paradigma Ushul Al-Fiqh Alternatif dan Pengembangan Studi Hukum Islam.*” Jurnal Al- ‘Adalah Vol. X, No. 4 (Medan: Fakultas Syari’ah IAIN Sumatera Utara, Juli 2012)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.* (Jakarta: Persada Media, 2014)
- Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam,* (Bandung: Mizan, 2009)
- Navaw, Hadari, dan Nini Martini, *Penelitian Terapan,* (Yogyakarta. 1996)
- Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,* (Raja Grafindo Persada, Jakarta), 1993
- Subarsono, Ab. 2005. “*Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*”. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana,* (Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2020)
- Wahbah Zunaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu,* (Jus VI, Dar al-Fikr, Damaskus, 1989)
- William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik,* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003)
- JURNAL**
- Desbayy. “Makalah Syariqoh (pencurian)” .  
<http://desbayy.blogspot.co.id/2015/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html>.
- Departemen Agama RI



Lampiran I : Pedoman Wawancara

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP ASIMILASI NARAPIDANA**  
**DI LAPAS KELAS IIA PEKANBARU BERDASARKAN**  
**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI**  
**MANUSIA NOMOR 10 TAHUN 2020**

**Pertanyaan**

1. Apakah benar Lapas Kelas IIA Pekanbaru adalah salah satu Lapas yang melaksanakan asimilasi narapidana berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020?
2. Berapa jumlah total narapidana di tahun 2020 sebelum dilaksanakan asimilasi narapidana berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020?
3. Pada saat awal pemberlakuan asimilasi narapidana berdasarkan Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020, adakah narapidana dan petugas Lapas Kelas IIA Pekanbaru yang dinyatakan positif Covid-19?
4. Bagaimana pelaksanaan asimilasi narapidana di Lapas Kelas IIA Pekanbaru yang dilaksanakan saat pemberlakuan Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020?
5. Jenis tindak pidana seperti apa yang mendapatkan hak asimilasi terkait pemberlakuan Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020?
6. Berapa jumlah total narapidana di Lapas Kelas IIA Pekanbaru yang mendapatkan asimilasi berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020?
7. Ada berapa tahapan yang dibuat oleh petugas Lapas Kelas IIA Pekanbaru untuk pelaksanaan asimilasi narapidana berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020?
8. Adakah hal yang menghambat pelaksanaan asimilasi narapidana saat penerapan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
9. Apa saja manfaat dari Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 yang sangat signifikan?
  10. Adakah keluhan masyarakat yang terdengar oleh pihak Lapas saat pelaksanaan asimilasi narapidana tersebut?
  11. Setelah satu bulan dilaksanakan asimilasi narapidana, berapa jumlah narapidana dan petugas Lapas Kelas IIA Pekanbaru yang dinyatakan positif Covid-19?
  12. Apa tindakan pemerintah dan aparat terkait jika ada kasus tindak pidana yang dilakukan kembali oleh residivis yang mendapatkan hak asimilasi tersebut?
  13. Bagaimana respon pemerintah dan aparat yang terkait mengenai berbagai polemik yang ada di masyarakat setelah diberlakukannya Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020?
  14. Pada saat ini (bulan Juni tahun 2021), berapa jumlah total narapidana di Lapas Kelas IIA Pekanbaru?
  15. Pada saat ini (bulan Juni tahun 2021), berapa orang jumlah narapidana dan petugas lapas yang dinyatakan positif Covid-19?
  16. Efektifkah Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 untuk pencegahan penularan Covid-19?
  17. Apakah perlu diadakan perbaikan mengenai Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 ini?